JURNAL FASILKOM
Volume 12 No. 1 | April 2022: 14-19

P-ISSN : 2089-3353
E-ISSN : 2808-9162

Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi Pemerintahan : E-Government

Nugraha Rachmatullah[1], Fenny Purwani[2]
[1,2]Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Raden Fatah Palembang
nugrahaa_rachmatullah@radenfatah.ac.id[1], fenny_purwani@radenfatah.ac.id[2]

Abstract

The use of information technology and digitization to improve the delivery of public services to citizens and companies is known as e-government. The purpose of this article is to analyze the importance of digital transformation and information technology infrastructure in the form of e-government in government institutions. In addition, the author will also describe solutions that become recommendations. The method used in this scientific article is qualitative. The results of the analysis show that there are still problems faced by Indonesia in the process of digitizing and developing this information technology infrastructure. Therefore, better utilization and improvement of the quality of e-government is needed, as well as leveling the development of this digitalization.

***Keywords**: E-Government, Digitalisation, Technology Information.*

Abstrak

Saat ini, sarana Infrastruktur teknologi di Indonesia sangatlah minim penggunaan baik Sumber Daya manusia, maupun Sumber Daya Pendukungnya, yang menyebabkan kesulitan didalam penyampaian informasi serta pelayanan publik kepada masyarakat. Diperlukan Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi untuk meningkatkan penyampaian layanan publik kepada warga dan perusahaan dikenal sebagai e-government. Tujuan dari artikel ini adalah menganalisis pentingnya transformasi digital dan infrastruktur teknologi informasi berupa e-government di institusi pemerintahan. Serta, penulis juga akan menjabarkan solusi yang menjadi rekomendasi. Metode yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam proses digitalisasi dan perkembangan infrastruktut teknologi informasi ini. Maka dari itu, dibutuhkan pemanfaatan dan peningkatan kualitas e-government yang lebih baik, sekaligus meratakan pembangunan digitalisasi ini. diharapkan dari digitalisasi ini proses penyampaian informasi dan pelayanan public kepada masyarakat menjadi efektif dan efisien,

Kata kunci: E-Government, Digitalisasi, Teknologi Informasi.

1. Pendahuluan

Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi untuk meningkatkan penyampaian layanan publik kepada warga dan perusahaan dikenal sebagai e-government. Sedangkan, e-government memiliki banyak definsi. Misalnya, didefinisikan oleh Nam [1] sebagai penyampaian layanan publik melalui penggunaan teknologi digital. Sedangkan, menurut Pudjianto et al. [2], di sisi lain, melihat e-government sebagai sarana untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah dan konstituennya, seperti warga negara dan perusahaan.

Kemajuan e-government memiliki sejumlah keuntungan. Hal ini memungkinkan komunikasi dua arah yang lancar antara pemerintah dan warga. E-government meningkatkan kualitas pemberian layanan publik [1] dan transparansi pengambilan keputusan pemerintah [3]. Hal ini juga meningkatkan pertukaran informasi antar instansi pemerintah [4].

P-ISSN : 2089-3353
E-ISSN : 2808-9162

Pemerintah Indonesia, seperti banyak negara lainnya, mengakui nilai e-government dalam membuat layanan publik lebih mudah diakses dan transparan bagi masyarakat umum. E-government diperlukan di Indonesia karena alasan berikut: (1) untuk membantu transisi pemerintah ke praktik pemerintahan yang demokratis; (2) membantu penerapan perimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah; (3) memfasilitasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah; (4) untuk mendapatkan keterbukaan; dan (5) membantu transformasi negara menuju era masyarakat informasi.

Adapun permasalahan yang ditemui pada penelitian ini antara lain : belumnya terealisasi-nya transformasi perkembangan Infrastruktur Teknologi di negara Indonesia dalam hal ini menyebabkan kesulitan didalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang dimana saat ini sangat dibutuhkan kecepeatan dan ketepatan, supaya masyarakat bisa memikmati hasilnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis pentingnya transformasi digital dan infrastruktur teknologi informasi berupa e-government di institusi pemerintahan. Serta, penulis juga akan menjabarkan solusi yang menjadi rekomendasi. Maka dari itu, judul dari artikel ini adalah "Analisi Pentingnya Digital & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi Pemerintahan : E-Government".

II. Metode

Artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif [5]. Sedangkan, bahan-bahan untuk dianalisis dalam artikel ilmiah ini menggunakan data sekunder. Data sekunder di dapat dari beberapa jurnal dan buku yang di dapatkan dari kumpulan beberapa buku dan jurnal yang sudah ter indeks secara nasional.

III. Pembahasan

3.1 Pentingnya E-Government di Indonesia

Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001 tentang Telematika, yang menetapkan bahwa pemerintah Indonesia harus menggunakan teknologi telematika untuk membantu pemerintahan yang baik, secara resmi membawa E-government ke administrasi publik di Indonesia. E-government diperlukan di Indonesia karena alasan berikut:

1. Untuk membantu transisi pemerintah ke praktik pemerintahan yang demokratis;
2. Membantu penerapan perimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah;
3. Memfasilitasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah;
4. Untuk mendapatkan keterbukaan; dan
5. Membantu transformasi negara menuju era masyarakat informasi.

3.2 Status Indonesia

Menurut World Economic Forum (WEF) [6], Indonesia saat ini berada di peringkat 98 dalam hal infrastruktur, dalam hal keterampilan sumber daya manusia, dalam hal penggunaan program, dan dalam hal dampak yang dicapai melalui implementasi program [7].

Dalam kasus Indonesia, infrastruktur masih belum terdistribusi secara luas. Hanya di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Medan, dan lain-lain, infrastruktur dibangun dan dibangun dengan baik, tetapi tidak di kota-kota kecil atau daerah perbatasan. Hal ini ditunjukan dari grafik 1, ada beberapa provinsi yang bahkan tidak memiliki jaringan internet sehingga sangat tidak mungkin mendapatkan teknologi informasi jika jaringan internet saja tidak ada.

P-ISSN : 2089-3353
E-ISSN : 2808-9162

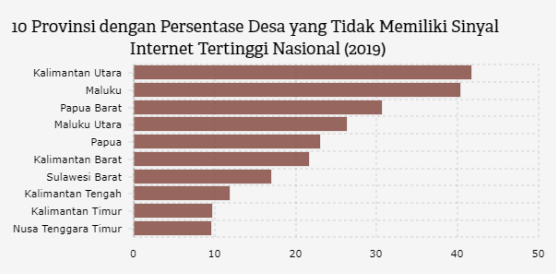

Grafik 1. Grafik 1. Presentase Desa yang Tertinggal Teknologi Informasi,Sumber:https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61cc241cc5567/kominfo-bangun-satelit-ribuan-menara-internet-ditarget-rampung-2024

Ini adalah salah satu masalah paling mendesak yang harus ditangani oleh pemerintah Indonesia jika tidak ingin ketinggalan. Namun, kita harus ingat bahwa Indonesia adalah pulau yang terbelah oleh lautan, memberikan tantangan baru bagi pemerintah Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur.

3.3 Tantangan

Menurut Indrajit [8], pemerintah menghadapi tiga (pohon) tantangan dalam penerapan e-government:

1. Menentukan cara membuat dan menentukan saluran akses digital;
2. Melibatkan lembaga lain di luar pemerintah, seperti swasta, dalam membangun infrastruktur dan suprastruktur yang diperlukan; dan
3. Merumuskan strategi kelembagaan, khususnya terkait dengan biaya investasi dan operasional.

3.4 Manfaat Penerapan

Menurut adaptasi Aritonang [9] ada beberapa manfaat dari penerapan e-government ini, diantaranya terdapat pada table 1.

Table 1. Manfaat e-goverment

Tanpa Batasan
Pemerintah elektronik akan membantu meruntuhkan hambatan badan dan yurisdiksi untuk memungkinkan layanan seluruh pemerintah yang lebih terintegrasi di seluruh tingkatan pemerintahan. Dengan pemerintahan elektronik, penyediaan akses tanpa batas akan dilakukan lebih jauh dan akan membuat pemerintah lebih mudah didekati.
Aksesbilitas Tinggi
Pemerintah di lingkungan off-line bisa jadi sulit untuk diakses. Ini sering membutuhkan kunjungan ke kantor pemerintah sementara beberapa kegiatan bisnis dapat dilakukan melalui telepon. Ini bisa menjadi masalah bagi orang-orang di lokasi regional dan terpencil. Pemerintah elektronik menawarkan potensi untuk meningkatkan akses informasi dan layanan secara signifikan.
Peningkatan Kualitas Layanan
Tujuan mendasar dari pemerintahan elektronik adalah untuk meningkatkan kualitas layanan bagi semua warga negara. Pemerintah elektronik mewakili layanan yang nyaman dan andal dengan biaya kepatuhan yang lebih rendah serta kualitas dan nilai yang lebih tinggi.
Membangun Citra
Peningkatan Reputasi Pemerintah elektronik membantu membangun citra suatu negara sebagai negara modern, lokasi yang menarik untuk dikunjungi orang, dan bisnis untuk berinvestasi.

3.5 Analisis Pentingnya Peningkatan Implementasi

P-ISSN : 2089-3353
E-ISSN : 2808-9162

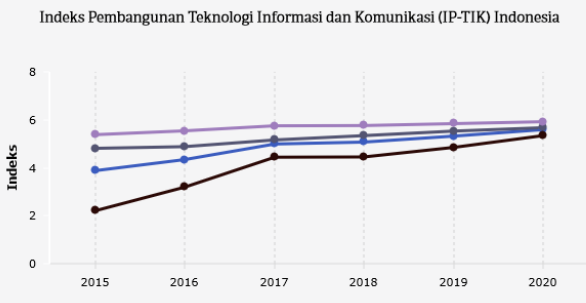

Grafik 2. Perkembangkan Teknologi Informasi Indonesia, Sumber : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/18/indeks-pembangunan-tik-indonesia-naik-jadi-559-pada-2020

Secara empiris, implementasi sistem E-government di lembaga publik Indonesia dapat kita bagi menjadi dua kategori. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai elemen yang mendukung dan membatasi. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia tercatat kembali meningkat pada 2020. Nilainya sebesar 5,59 atau naik sekitar 5% dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,32 seperti pada grafik 2. Namun, hal ini belum sepenuhnya menjadi hal yang bagus apabila angka ini tetap.

Sistem E-government dilaksanakan pada kondisi pertama sebelum undang-undang nasional diundangkan, atau bahkan sebelum program E-government menjadi perhatian utama di Indonesia. Tahap persiapan, yang meliputi penyediaan beberapa perangkat pendukung fisik, pusat data, dan unit khusus untuk menangani tugas tersebut, telah selesai saat ini. Pembangunan sistem e-government adalah langkah selanjutnya. Periode ini banyak terjadi di lembaga-lembaga pemerintah pusat. Departemen Keuangan adalah salah satunya [9].

Selama waktu ini, pemerintah pusat mulai mempertimbangkan perlunya memodernisasi perangkat dan teknologi layanan publik secara menyeluruh. Pemerintah nasional kemudian mengakui bahwa beberapa negara berkembang dan maju, termasuk Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang, terlambat dari jadwal. Modernisasi pelayanan publik adalah kunci untuk meningkatkan kualitas kompetitif. Tahap selanjutnya adalah mengesahkan banyak undang-undang dan instruksi nasional, serta mendorong praktik terbaik penerapan E-government [10]. Sistem E-government diumumkan secara substansial setelah penerapan berbagai peraturan perundang-undangan di bawah kriteria kedua, dan pemerintah pusat mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk membentuk sistem e-government.

Selama ini, banyak pemerintah daerah semakin menerima gagasan modernisasi gadget dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sampai saat ini, hampir semua instansi pemerintah telah menggunakan teknologi E-government [11]. Namun, tantangannya adalah bahwa implementasi kebijakan E-government yang meluas belum menghasilkan peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, menyebabkan berbagai masalah. Maka dari itu, peningkatan perlu dilakukan demi tercapainya E-government yang lebih baik dan bisa mengejar ketertinggalan dengan negara baik, sekaligus memaksimalkan manfaat yang bisa didapat dari E-government ini.

3.6 Solusi untuk E-Government Indonesia

Sosiawan [12] mengusulkan tiga (tiga) opsi untuk menjadi penerapan E-government di Indonesia.

1. Pemerintah pusat harus menyusun masterplan dan grand strategy e-Government, yang harus dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, dan arah pelaksanaannya harus mencakup langkah-langkah teknis pelaksanaan dan penyediaan sarana, bukan sekedar pengertian. Selanjutnya, pemerintah federal dan pemerintah daerah harus mempertimbangkan

P-ISSN : 2089-3353
E-ISSN : 2808-9162

anggaran operasional serta anggaran pemeliharaan yang diperlukan.

2. Tuntutan pendidikan terpadu dan pelatihan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan sumber daya manusia dalam konteks adopsi e-Government memerlukan pertimbangan dan kerjasama yang cukup baik antara pemerintah, universitas, dan pihak swasta. Poin terpenting adalah bahwa kunci keberhasilan penerapan e-Government adalah kompetensi manajemen manusia, bukan teknologi [13]. Dari sisi manajerial, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menciptakan model E-government dengan manajemen yang kompeten. Agar tidak terjadi kerancuan dalam pengelolaan dan implementasi e-government di pemerintahan daerah, maka struktur organisasi yang ada di departemen, kementerian, dan lembaga pemerintah yang bersifat non-departemen perlu diperjelas sebagai bagian dari organisasi yang menangani e-Government yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi struktur organisasi yang sudah ada [14]. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa pengetahuan anggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi sangat penting dalam administrasi eGovernment.
3. Dari sisi sarana dan prasarana, diperlukan strategi pemerintah yang merangkul pihak swasta, khususnya penyedia TIK, dalam bentuk kerjasama terpadu yang menguntungkan kedua belah pihak [15]. Dari atas ke bawah, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan akses dan berbagai infrastruktur telekomunikasi. Hal ini misalnya memberikan tarif yang transparan dan terjangkau bagi semua.

IV. Kesimpulan

Dari pemaparan di bagian sebelumnya, Indonesia tergolong masih rendah dalam digitalisasi dan infrastruktur teknologi informasinya. Seperti dikatakan dalam data WEF bahwa Indonesia saat ini berada di peringkat 98 dalam hal infrastruktur, 63 dalam hal keterampilan sumber daya manusia, 77 dalam hal penggunaan program, dan 74 dalam hal dampak yang dicapai melalui implementasi program. Hal ini juga dikarenakan belum meratanya pembangunan infrastruktur teknologi di Indonesia. E-government di Indonesia di Indonesia karena alasan berikut: (1) untuk membantu transisi pemerintah ke praktik pemerintahan yang demokratis; (2) membantu penerapan perimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah; (3) memfasilitasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah; (4) untuk mendapatkan keterbukaan; dan (5) membantu transformasi negara menuju era masyarakat informasi.

Jika hal ini diterapkan, maka Indonesia bisa membuka Batasan antara warga dengan pemerintahnya serta aksesbiitas yang lebih tinggi dengan adanya e-government ini. Sehingga komunikasi pemerintah dan masyarakat berjalan lancar. Serta, segala peraturan, program, dan arahan pemerintah lebih mudah diterima masyarakat. Sekaligus, hal ini akan membantu citra pemerintah yang sudah fasih akan digitalisasi dan teknologi informasi. Diharapkan, Indonesia akan terus mengejar ketertinggalnnya. Dari Hasil penelitian ini didapatkan bahwa masih terdapat permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam proses digitalisasi dan perkembangan infrastruktut teknologi informasi ini. Maka dari itu, dibutuhkan pemanfaatan dan peningkatan kualitas E-government yang lebih baik, sekaligus meratakan pembangunan digitalisasi ini. diharapkan dari digitalisasi ini proses penyampaian informasi dan pelayanan publik kepada masyarakat menjadi efektif dan efisien

P-ISSN : 2089-3353
E-ISSN : 2808-9162

Daftar Pustaka

[1] T. Nam, "Determining the Type of E-Government Use," Government Information Quarterly, vol. 31, no. 2, pp. 211-220, 2014.

[2] Pudjianto, B., Zo, H., Ciganek, A., and Rho, J.J, "Determinants of E-Government Assimilation in Indonesia: An Empirical Investigation Using Toe Framework," Asia Pasific Journal of Information Systems, vol. 21, no. 1, pp. 1-8, 2011.

[3] Deng, H., Karunasena, K., and Xu, W, "Evaluating the Performance of E-Government in Developing Countries," Internet Research, vol. 28, no. 1, pp. 169-190, 2018.

[4] Puspitasari, L., and Ishii, K., "Digital Divides and Mobile Internet in Indonesia: Impact of Smartphones," Telematics and Informatics, vol. 32, no. 2, pp. 472-483, 2016.

[5] Firmansyah, M., & Masrun, M, "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif," Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan, vol. 3, no. 2, pp. 156-159, 2021.

[6] The World's Economic Forum (WEF), [Online]. Available: http://www.weforum.org/.

[7] L. &. P. E. P. Salsabila, "Establishing and Implementing Good Practices E-Government (A Case Study: e-Government Implementation between Korea and Indonesia)," In ASEAN/Asian Academic Society International Conference Proceeding Series, 2017.

[8] R. E. Indrajit, "Tiga Tantangan Besar E-Government," Seri 999 E-Artikel Sistem dan Teknologi Informasi, pp. 2-8, 2013.

[9] Aritonang, D. M, "The impact of e-government system on public service quality in Indonesia," European Scientific Journal, vol. 13, no. 35, pp. 99-111, 2017.

[10] Sabani, A, " Investigating the influence of transparency on the adoption of e-Government in Indonesia," Journal of Science and Technology Policy Management, 2020.

[11] Sabani, A., Deng, H., & Thai, V, "A conceptual framework for the adoption of e-government in Indonesia," In Proceedings of the Proceedings of the 29th Australasian Conference on Information Systems (ACIS), 2018.

[12] Sosiawan, E. A, "Tantangan dan Hambatan dalam implementasi E-Government di Indonesia," In Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF), vol. 1, no. 5, pp. 1-14, 2015.

[13] Rokhman, A, "e-Government adoption in developing countries; the case of Indonesia," Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, vol. 2, no. 5, pp. 228-236, 2011.

[14] Witarsyah, D., Sjafrizal, T., Fudzee, M. F. M., & Salamat, M. A, "The critical factors affecting e-government adoption in indonesia: A conceptual framework," International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, vol. 7, no. 1, pp. 160-167, 2017.

[15] Sabani, A, "The implementation of e-government in Indonesia," International Journal of Research in Business and Social Science, vol. 9, no. 7, pp. 190-196, 2020.